

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA KEDIRI

Yanur Setyaningrum¹ & Trisakti Handayani²

¹Mahasiswa Pasca Sarjana & ²Staf Pengajar Program Pasca Sarjana, Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi : Jl. Bandung No.1 Malang
Email: trisaktihandayaniwidodo@gmail.com

ABSTRACT

Gender issues being most discussed issue in the context of relations between men and women and in the context of relations within the community, development or state. Mandate the implementation of gender equality is enshrined in various laws and regulations. Rules include amendments to article 31 of the 1945 Constitution and Act 7 of 1984 Concerning Ratification of Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Observations carried out in the Department of Education to obtain data Kediri extent of implementation of Permendagri number 15 of 2008 on Guidelines for Implementation of Gender Mainstreaming in the General area Kediri have been done.

Implementation Permendagri 15 of 2008 on Gender Mainstreaming in Elementary Education Level in Kediri is still not optimal, it can be seen from the three districts in Kediri gender inequality persists in three issues of the Access and Equity, Quality and Relevance and Accountability and Governance education. On the issue of Access and Equity, gender inequality is influenced by factors: economics, motivation and environment. While the issues of quality and relevance, factors that cause gender inequality are: economic, social, cultural, and environmental. Factors - factors above are also almost the same as it did on the issue of the Education Accountability and Governance: socio-cultural factors, economic, internal female, family, religion, motivation, and the motive to excel. Gender issues being hotly discussed issue in the context of relations between men and women and in the context of relations within the community, development or state.

PENDAHULUAN

Isu gender menjadi isu yang hangat dibicarakan dalam konteks relasi antara laki-laki dan perempuan ataupun dalam konteks relasi di dalam masyarakat, pembangunan ataupun bernegara. Amanat implementasi kesetaraan gender itu termaktub dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut meliputi amandemen UUD 1945 pasal 31 dan UU No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*). UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pun menegaskan bahwa pendidikan adalah hak warga negara baik laki-laki maupun perempuan yang dapat ditempuh melalui jalur sekolah maupun luar sekolah. UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Propenas) juga menegaskan bahwa sasaran Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan adalah meningkatkan kualitas dan peranan perempuan di berbagai bidang. Selain itu, Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 menyatakan pula perlunya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan nasional pemberdayaan perempuan. Secara khusus telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang diikuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu membentuk unit organisasi yang menangani kegiatan pemberdayaan perempuan.

Departemen Dalam Negeri telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan adanya Permendagri Nomor 15 Tahun 2008

Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri ini menginstruksikan kepada seluruh Pemerintah Daerah, termasuk Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Daerah diwajibkan untuk melekatkan seluruh proses pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender dengan melibatkan peran serta warga negara baik laki-laki maupun perempuan.

Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 salah satunya dapat dilihat dalam bidang pendidikan di daerah. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Baik buruknya kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin baik juga kualitas sumberdaya manusianya. Pendidikan dapat memberikan nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik kepada setiap individu disamping juga dapat digunakan sebagai alat untuk mentransformasikan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pendidikan bagi setiap individu baik laki-laki maupun perempuan sangatlah penting.

Keberhasilan pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan sangat ditentukan oleh komitmen para pengambil kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang terwujud dalam; (1) kebijakan yang responsif gender; (2) dukungan sumber daya manusia sebagai *focal point* gender bidang pendidikan; (3) dukungan kelembagaan; dan (4) dukungan anggaran, baik melalui APBN maupun APBD provinsi/kabupaten/kota.

Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain dari gejala berbedanya akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Oleh karena itu, dalam rangka pengarusutamaan gender bidang pendidikan maka perlu disusun berbagai instrumen kebijakan yang lebih operasional. Khusus di sektor pendidikan, perlu diterapkan program-program rutin dan pembangunan yang dapat memperkecil kesenjangan gender, baik dalam *input*, proses dan *ouput* pendidikan.

Kesenjangan gender pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Kota Kediri tampak dari beberapa aspek pendidikan yang mempunyai IP cenderung

merugikan laki-laki. Berangkat dari kondisi kesenjangan gender yang merugikan laki-laki tersebut, sekaligus sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan yang tekah diterapkan terutama menunjang terlaksananya wajib belajar sembilan tahun maka sangat perlu dilakukan kajian atau penelitian tentang **Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri.**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan substansi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mendeskripsikan pelaksanaan implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didukung dengan pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif yang digunakan meliputi: pengamatan berperan serta (observasi partisipasi), wawancara (*interview*), dan pemanfaatan dokumen. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu peneliti bertujuan membuat pancandraan (paparan) secara sistematis, faktual dan akurat kritis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat subjek penelitian.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini mengambil di Kota Kediri. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menganalisis implementasi kebijakan pada Dinas Pendidikan Kota Kediri. Dalam penentuan subjek penelitian, dilakukan secara selektif berdasarkan hasil observasi yang menunjukkan bahwa tingkat

kesetaraan gender pada Kota Kediri masih rendah. Pemilihan tersebut dilakukan secara *purposive*.

Data dan Sumber Data

Data utama dalam penelitian kualitatif dapat berupa kata-kata dan keterangan lisan atau tertulis. Sumber data adalah subyek atau dokumen dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2004). Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu data primer dan data sekunder.

Sumber data dalam penelitian kualitatif berupa sumber data tertulis, foto, dan data statistik. Peneliti implementasi Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah menggunakan sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dan dokumen resmi yang berasal dari undang-undang, peraturan-peraturan atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Sumber data kuantitatif berupa data yang diperoleh dari dokumen yang berupa indikator gender bidang pendidikan yang digunakan untuk mengukur kesetaraan dan kesenjangan gender dengan menggunakan alat ukur Indeks Paritas dan Disparitas sebagaimana tercantum dibawah ini.

$$\text{Indeks Paritas} = \frac{\text{Capaian Kinerja Perempuan}}{\text{Capaian Kinerja Laki-Laki}}$$

Disparitas = Capaian Kinerja Perempuan – Capaian Kinerja Laki-Laki.

Jika nilai IP (Indeks Paritas) sama dengan 1, maka terjadi kesetaraan gender, tetapi jika menjauhi angka 1 (lebih kecil dari 1), maka terjadi ketidaksetaraan gender yang merugikan perempuan, dan sebaliknya jika nilai IP lebih besar dari 1, maka terjadi ketidaksetaraan gender merugikan pihak laki-laki

Sedangkan untuk mengukur APS, APK dan APM digunakan alat ukur sebagai berikut:

$$AP_{SD/MTs} = \frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}}$$

$$AP_{SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang sekolah}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}}$$

$$APK_{SD/MI} = \frac{\text{Jumlah siswa SD dan MI}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}}$$

$$APK_{SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah siswa SMP dan MTs}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}}$$

$$APM_{SD/MI} = \frac{\text{Jumlah siswa SD dan MI yang berusia 7-12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}}$$

$$APM_{SMP/MTs} = \frac{\text{Jumlah siswa SMP dan MTs yang berusia 13-15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13-15 tahun}}$$

Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) pedoman wawancara (*interview guide*), Pedoman ini untuk mendapatkan informasi dari informan terpilih; 2) Pedoman observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian.; 3) Catatan lapangan (*field notes*), digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan; 4) Alat perekam, dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi/Pengamatan

Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Observasi dilakukan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Kediri untuk mendapatkan data sejauh mana implementasi dari Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*) dengan maksud agar responden tahu bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud wawancara tersebut. Teknik ini dilakukan secara khusus dengan pihak-pihak secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam Implementasi Permendagri No 15 tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah di Kota Kediri.

3. Dokumentasi

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen baik yang berada di dalam ataupun yang berada di luar Dinas Pendidikan yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis diskriptif kualitatif dan kuantitatif yang didukung oleh teori *Content Analysis*, GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan *Root Analysis*. Metode analisis yang dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif yang diperoleh dengan wawancara mendalam dan observasi dilakukan analisa dengan metode analisis yang dikenalkan Miles dan Huberman (1992).

Teknik Keabsahan Data

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong (2004), ada empat kriteria yang digunakan, yaitu: a. derajat kepercayaan (*credibility*); b. keteralihan (*transferability*); c. kebergantungan (*dependability*); d. kepastian (*confirmability*). Uji keabsahan dalam penelitian ini adalah uji *credibility*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini akan menguraikan hasil penelitian tentang Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender

<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/1399> pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri dengan fokus: Substansi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri dan Kendala yang dihadapi dalam implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri. Masing- masing sub fokus tersebut akan dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang telah ditentukan.

Substansi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Subtansi paling utama dalam implementasi permendagri nomor 15 tahun 2008 adalah bagian perencanaan dan pelaksanaan pada pasal 4, 5 dan 6.

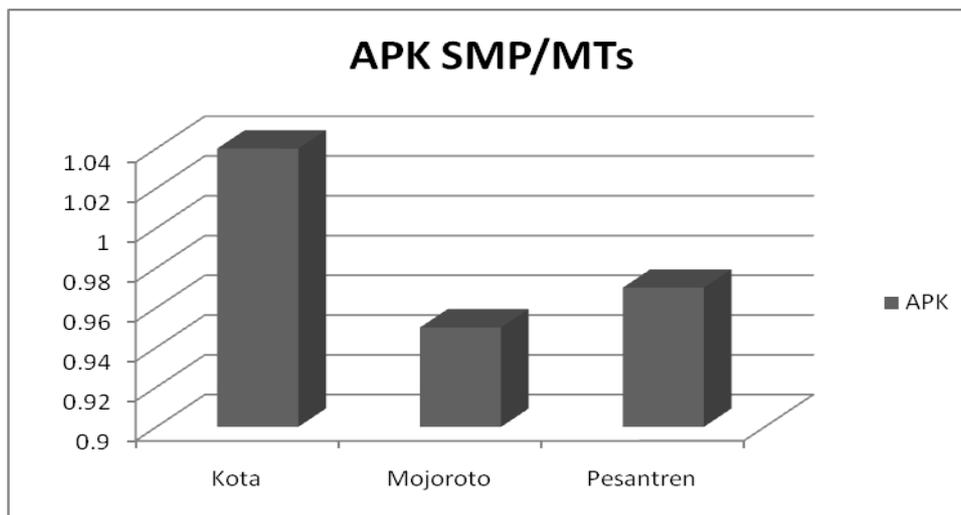
Pasal 4 berisi kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan berperspektif gender dan penyusunan itu dilakukan melalui analisis gender. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender tersebut dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

Informasi mengenai konsep dasar dan mekanisme perencanaan di daerah merupakan satu aspek yang sangat penting untuk menerapkan atau mengimplementasikan Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG) sebagai penerwujudan amanat dari Permendagri No.15/2008 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah. PPRG merupakan suatu proses mengintegrasikan dimensi gender dalam proses perencanaan dan penganggaran tersebut. Tanpa informasi yang jelas mengenai konsep dan mekanisme perencanaan, maka kita akan kehilangan esensi. Oleh karena itu kita perlu untuk memahami kerangka, pendekatan dan cakupan dokumen perencanaan mulai dari yang strategis hingga yang tahunan.

Sistem perencanaan dan penganggaran nasional diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti tertera pada bagan 1 di bawah ini:

Tabel 1. APK Pendidikan Dasar (SMP/MTs) Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2011/2012

No.	Kecamatan	Indikator APK SMP/MTs			
		L(%)	P(%)	IP	Disp.
1.	Kota	49	50.99	1.04	1.98
2.	Mojooroto	51.24	48.75	0.95	-2.49
3.	Pesantren	50.68	49.37	0.97	-1.305
Rata-rata		50.30	49.70	0.98	-1.815



Gambar 2.. APK Pendidikan Dasar (SMP/MTs) Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2011/2012.

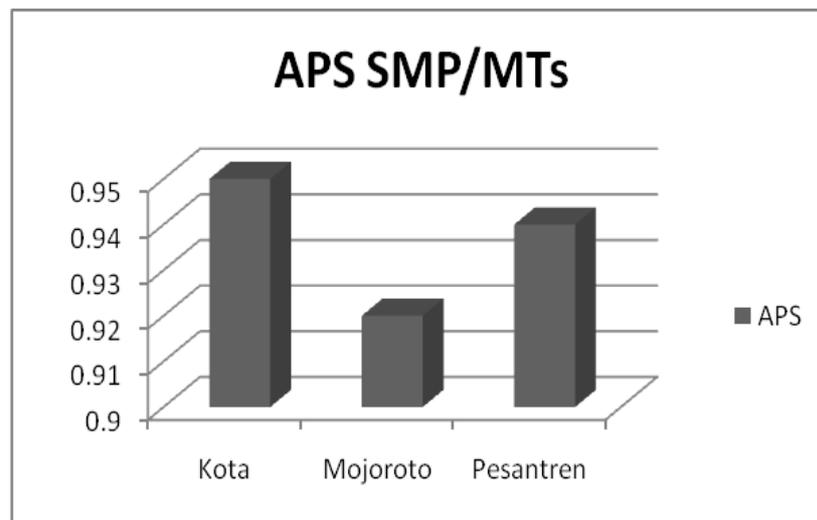
Sebagian besar kecamatan di Kota Kediri terjadi kesetaraan gender pada APK SMP/MTs. Ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan laki-laki terdapat di Kecamatan Kota dengan IP sebesar 1.04, sedangkan di kecamatan Mojooroto dan Pesantren terjadi kesetaraan gender dengan IP masing-masing sebesar 0.95 dan 0.97.

b. Indeks Paritas dan Disparitas APS SMP/MTs Menurut Jenis Kelamin

Secara umum APS SMP/MTs di Kota Kediri terdapat ketidaksetaraan gender dengan IP sebesar 0.93. Rincian IP dan Disparitas masing-masing Kecamatan di Kota Kediri dapat dilihat pada Tabel 4 dan Gambar 8.

Tabel 2. APS Pendidikan Dasar (SMP/MTs) Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2011/2012

No.	Kecamatan	Indikator APS SMP/MTs			
		L(%)	P(%)	IP	Disp.
1.	Kota	51.20	48.79	0.95	-2.402
2.	Mojooroto	51.85	48.15	0.92	-3.7
3.	Pesantren	51.36	48.63	0.94	-2.66
Rata-rata		51.47	48.52	0.93	-2.92



Gambar 3. APS Pendidikan Dasar (SMP/MTs) Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2011/2012

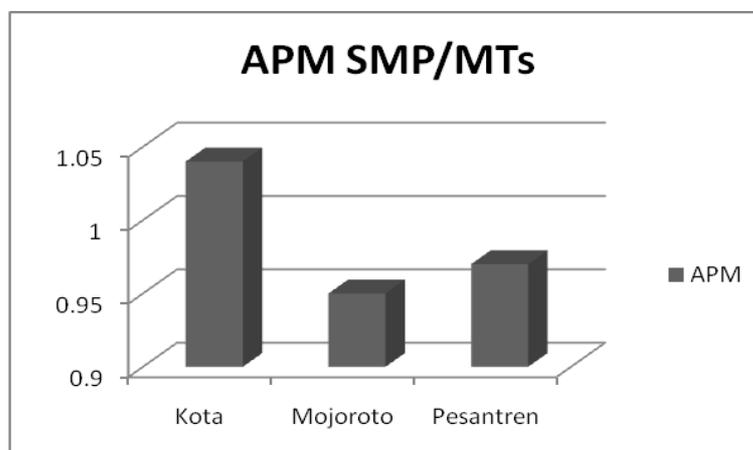
Sebagian besar kecamatan di Kota Kediri terjadi ketidaksetaraan gender pada APS SMP/MTs. Ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan perempuan terdapat di Kecamatan Mojoroto dengan IP sebesar 0.92, sedangkan di kecamatan Pesantren ketidaksetaraan gender yang merugikan perempuan dengan IP 0.94.

c. Indeks Paritas dan Disparitas APM SMP/MTs Menurut Jenis Kelamin

Secara umum APM SMP/MTs di Kota Kediri terdapat kesetaraan gender dengan IP sebesar 0.98. Rincian IP dan Disparitas masing-masing Kecamatan di Kota Kediri dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 10.

Tabel 3. APM Pendidikan Dasar (SMP/MTs) Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2011/2012

No.	Kecamatan	Indikator APM SMP/MTs			
		L(%)	P(%)	IP	Disp.
1.	Kota	49	50.99	1.04	1.98
2.	Mojoroto	51.24	48.75	0.95	-2.49
3.	Pesantren	50.68	49.37	0.97	-1.305
	Rata-rata	50.30	49.70	0.98	-1.815



Gambar 4. APM Pendidikan Dasar (SMP/MTs) Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2011/2012

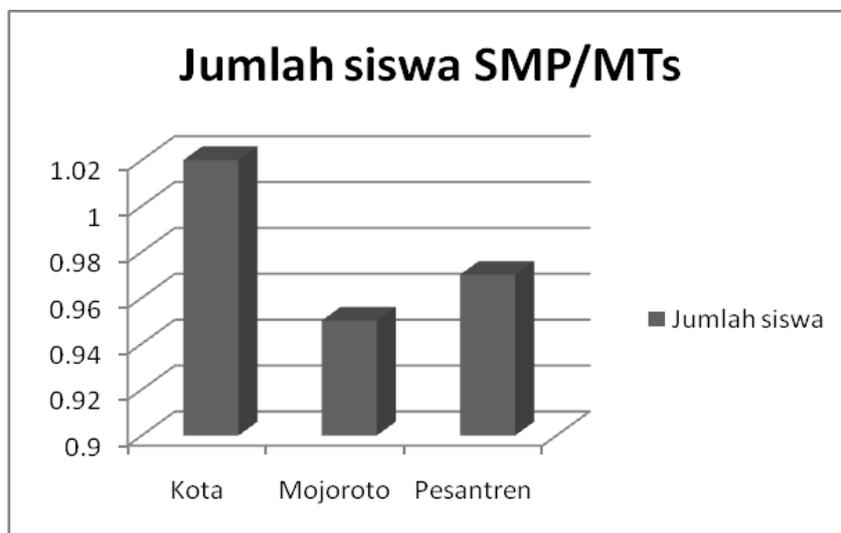
Sebagian besar kecamatan di Kota Kediri terjadi kesetaraan gender pada APM SMP/MTs. Ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan laki-laki terdapat di Kecamatan Kota dengan IP sebesar 1.04, sedangkan di kecamatan Mojoroto dan Pesantren terjadi kesetaraan gender dengan IP masing-masing sebesar 0.95 dan 0.97.

d. Indeks Paritas dan Disparitas Jumlah siswa SMP/MTs Menurut Jenis Kelamin

Secara umum Jumlah siswa SMP/MTs di Kota Kediri terdapat kesetaraan gender dengan IP sebesar 0.98. Rincian IP dan Disparitas masing-masing Kecamatan di Kota Kediri dapat dilihat pada Tabel 8 dan Gambar 12.

Tabel 4. Jumlah Siswa Pendidikan Dasar (SMP/MTs) menurut jenis kelamin di Kota Kediri tahun 2011/2012

No.	Kecamatan	Indikator Jumlah Siswa SMP/MTs			
		L(%)	P(%)	IP	Disp.
1.	Kota	49.42	50.57	1.02	1.15
2.	Mojoroto	51.24	48.75	0.95	-2.49
3.	Pesantren	50.63	49.36	0.97	-1.27
	Rata-rata	50.43	49.56	0.98	- 0.87



Gambar 5. Jumlah Siswa Pendidikan Dasar (SMP/MTs) menurut jenis kelamin di Kota Kediri tahun 2011/2012

Sebagian besar kecamatan di Kota Kediri terjadi kesetaraan gender pada Jumlah siswa SMP/MTs. Kesetaraan gender di kecamatan Kota dengan IP sebesar 1.02, sedangkan kesetaraan gender di Kecamatan Mojoroto dan Pesantren masing-masing 0.95 dan 0.97.

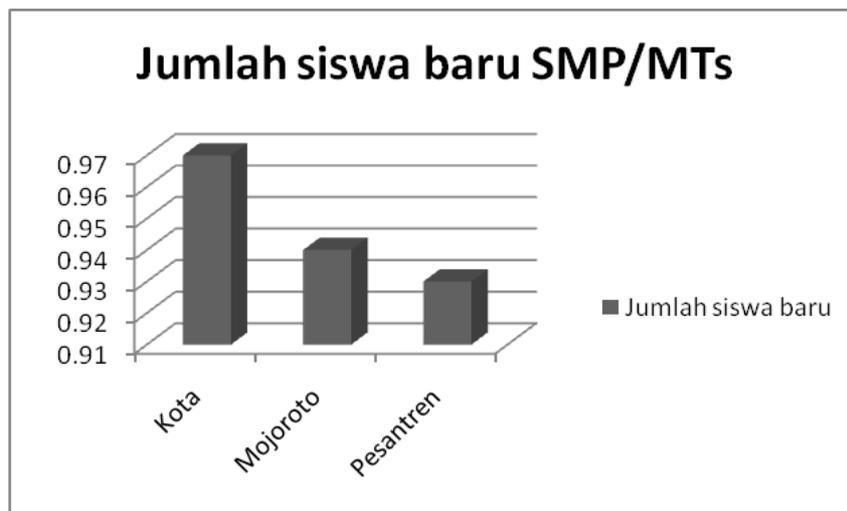
IP sebesar 0.94. Rincian IP dan Disparitas masing-masing Kecamatan di Kota Kediri dapat dilihat pada Tabel 10 dan Gambar 14.

e. Indeks Paritas dan Disparitas Jumlah siswa baru SMP/MTs Menurut Jenis Kelamin

Secara umum Jumlah siswa baru SMP/MTs di Kota Kediri terdapat ketidaksetaraan gender dengan

Tabel 5. Jumlah Siswa baru Pendidikan Dasar (SMP/MTs) menurut jenis kelamin di Kota Kediri tahun 2011/2012

No.	Kecamatan	Indikator Jumlah Siswa Baru SMP/MTs			
		L(%)	P(%)	IP	Disp.
1.	Kota	50.72	49.27	0.97	-1.45
2.	Mojooroto	51.43	48.56	0.94	-2.87
3.	Pesantren	51.56	48.43	0.93	-3.13
	Rata-rata	51.23	48.75	0.94	-2.48



Gambar 6. Jumlah Siswa baru Pendidikan Dasar (SMP/MTs) Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri tahun 2011/2012

Sebagian besar kecamatan di Kota Kediri terjadi ketidaksetaraan gender pada Jumlah siswa baru SMP/MTs. Ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan perempuan terdapat di Kecamatan Pesantren dengan IP sebesar 0.93, sedangkan di kecamatan Mojooroto juga terjadi ketidaksetaraan gender yang merugikan perempuan dengan IP 0.94. Berbeda dengan kecamatan Kota yang terjadi kesetaraan gender dengan IP sebesar 0.97.

Hasil data kuantitatif diatas menunjukkan, pada isu Akses dan Pemerataan secara umum terjadi ketidaksetaraan gender yang merugikan pihak perempuan. Namun pada indikator APK dan APS pada jenjang pendidikan SD/MI dan MTs terjadi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada indikator APS, Jumlah siswa dan Jumlah siswa baru pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs secara umum terjadi ketidaksetaraan gender yang merugikan pihak perempuan.

Adapun Faktor yang mempengaruhi munculnya ketidaksetaraan gender pada indikator APS pada jenjang pendidikan SD/MI diantaranya adalah:

Faktor Ekonomi

Tingkat ekonomi dari keluarga disinyalir menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat APS yang ada di Kota Kediri. Menurut Soeprobo (2006) masalah ekonomi penduduk merupakan salah satu faktor yang selama ini diduga menjadi pangkal terjadinya ketimpangan atau ketidaksetaraan gender dalam bidang pendidikan. Anak yang termasuk miskin memiliki kondisi partisipasi sekolah yang kurang baik dibanding yang tidak miskin, baik pada anak laki-laki maupun perempuan.

Kondisi di Kota Kediri sama dengan kondisi daerah yang latar belakang masyarakatnya matrilineal, misalnya Sumatera Barat. Menurut Hasil Penelitian Hellyan (2007) anak perempuan miskin memiliki partisipasi sekolah lebih baik dibanding anak laki-laki miskin.

Faktor Motivasi

Jika dibandingkan, motivasi antara anak laki-laki dan perempuan cenderung lebih besar anak perempuan. Perempuan lebih cenderung rajin dibandingkan dengan anak laki-laki. Pernyataan ini didukung oleh hasil penelitian Maulana (2012) yang menyatakan bahwa motivasi belajar perempuan lebih besar daripada laki-laki. Hal ini terjadi karena wanita cenderung lebih rajin dan fokus dalam mengerjakan sesuatu sehingga terlihat bahwa motivasi siswa perempuan lebih tinggi dibandingkan motivasi siswa laki-laki.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender pada indikator APS pada jenjang pendidikan SMP/MTs adalah sebagai berikut:

Ekonomi.

Hampir sama dengan jenjang pendidikan SD/MI dapat pula dikatakan bahwa tingkat ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat APS pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Kediri. Sehubungan dengan itu, menurut analisis Sudarta (2003) kiranya satu alasan pokok yang menyebabkan ketimpangan gender pada jenjang pendidikan SMP yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi biaya yang diperlukan. Bagi keluarga atau rumah tangga yang berlatar belakang ekonomi lemah (miskin), umumnya lebih mengutamakan anak laki-laki untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi, karena tenaga kerja perempuan dibutuhkan di rumah.

Faktor lingkungan

Usia 13-16 tahun adalah usia dimana terjadinya perubahan dari masa anak-anak menuju masa remaja. Periode remaja (adolescence) adalah transisi perkembangan antara masa anak-anak menuju masa dewasa yang membutuhkan keterkaitan antara perubahan fisik, kognitif dan psikososial (Papalia *et al.*, 2001). Masa pubertas ini adalah masa dimana seorang anak lebih cenderung mudah terpengaruh lingkungannya (teman sebaya). Anak laki-laki disinyalir lebih mudah untuk terpengaruh teman-teman sepergaulannya dibanding anak perempuan. Menurut

Santrock (2007), fungsi utama dari teman sebaya adalah memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga, sehingga hubungan dengan teman sebaya yang buruk dapat membawa anak ke perilaku yang buruk dan begitu sebaliknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian Implementasi Permendagri No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri serta menguraikan tentang saran dari peneliti terkait dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan terhadap Implementasi Permendagri No.15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum substansi Permendagri No. 15 tahun 2008 sudah baik namun demikian beberapa permasalahan masih ditemui. Permasalahan tersebut terdapat pada beberapa pasal, diantaranya: (a) Pasal 1 tidak mendefinisikan ketidakadilan gender.; (b) Pasal 4 berisi kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan berperspektif gender dan penyusunan itu dilakukan melalui analisis gender, namun agar hasil dapat dibuktikan maka penetapan kerangka pengukuran kinerja responsif gender sangat diperlukan;
2. Implementasi Permendagri No.15 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri masih belum optimal, hal tersebut bisa dilihat dari ketiga kecamatan di Kota Kediri masih terjadi ketidaksetaraan gender pada tiga isu yakni Akses dan Pemerataan, Mutu dan Relevansi serta Akuntabilitas dan Tatakelola Pendidikan. Pada isu Akses dan Pemerataan, ketidaksetaraan gender dipengaruhi oleh faktor: ekonomi, motivasi

dan lingkungan. Sedangkan pada isu Mutu dan Relevansi, faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan gender tersebut adalah: ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Faktor – faktor diatas juga hampir sama seperti yang terjadi pada isu Akuntabilitas dan Tatakelola Pendidikan yakni: faktor sosial budaya, ekonomi, internal perempuan, keluarga, agama, motivasi, dan motif untuk berprestasi.

3. Kendala yang dihadapi dalam Implementasi Permendagri No.15 Tahun 2008 pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Kediri meliputi kurangnya pemahaman Kepala Dinas tentang gender dan pengarusutamaan gender, materi gender dianggap materi yang sulit, dan pengarusutamaan gender bukan prioritas Dinas Pendidikan Kota Kediri.

Saran

1. Perlu mengoptimalkan Implementasi Permendagri No.15 Tahun 2008 dalam upaya terjadi kesetaraan gender / keadilan gender dengan cara mendirikan Organisasi Gender dan aktif mempublikasikan Pengarusutamaan Gender melalui berbagai media.
2. Perlu mencari solusi dari kendala yang dihadapi dalam bentuk: upaya penyadaran dan meningkatkan pemahaman Kepala Dinas tentang gender dan pengarusutamaan gender, mencari langkah mudah memahami materi gender dengan melakukan kerjasama dan asistensi pakar gender (melibatkan Tim Pakar Gender dari perguruan tinggi atau Pusat-Pusat Studi Gender) dan menjadikan pengarusutamaan gender sebagai prioritas Dinas Pendidikan Kota Kediri dengan upaya membentuk pokja dan *focal point* khusus yang menangani gender.
3. Mengingat masih terbatasnya pemahaman Kepala Dinas Pendidikan dan Para Pengambil Kebijakan di Dinas Pendidikan Kota Kediri terkait PUG di jenjang pendidikan maka diperlukan upaya peningkatan kualitas dan pemahaman mereka (*capacity building*) agar nantinya menghasilkan kebijakan yang tepat dan tidak hanya sekedar meng-*copy paste* peraturan yang lebih tinggi atau yang di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hellyan. 2007. *Analisis Gender pada Pendidikan Anak Usia Sekolah di Sumatera Barat*. Padang: Fakultas Pertanian UNAND.
- Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Tanggal 19 Desember 2000.
- Moleong, L.J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Oedjoe, M.R. 2010. *Modul Panduan Merancang Bahan Ajar yang Adil dan Setara Bagi Anak Perempuan dan Laki-laki*. Kupang: Universitas Nusa Cendana.
- Papalia, E. D; Olds; W. S. ; Feldman, D. R. 2001. *Human Development (8th.ed)*. New York: Mc Graw Hill Companies, Inc.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.
- Rosita, R. 2010. *Kata Pengantar Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI*. Dalam Sutarjo, US; Maya, G; Saguni, A.; Musafin, L; Moerniati, E.; Darsono; Prasetya, L; Harijanti, L; Hamim, A. 2010. *Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI – Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak – UNFPA.
- Santrock, J.W. 2001. *Adolescence (8th ed.)* New York: McGraw-Hill Company, Inc.

Soeprobo, T.B. 2006. Ketimpangan Gender dalam Pendidikan: Apakah Kurikulum Ikut Berperan? *Warta Demografi Edisi Tahun 36, No.1, 2006.*

Sudarta, W. 2003. **Ketimpangan Gender Di Bidang Pendidikan.** *Jurnal Studi Jender Volume 2-Juli 2003.*

Susiana, S. 2011. **Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah (Studi di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali).** *Jurnal Kajian Volume 16 No.1 Tahun 2011.*

Sutarjo, US; Maya, G; Saguni, A.; Musafin, L; Moerniati, E.; Darsono; Prasetya, L; Harijanti, L; Hamim, A. 2010. **Panduan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Bidang Kesehatan.** Jakarta: Kementerian Kesehatan RI – Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak – UNFPA.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000 – 2004.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Widodo, W.; Kepi, S.; Asri, H.; Wuriyanto, A.B.; Siti, C.H.; Sugiarti, Siti, A. 2008. **Position Paper Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Pendidikan Propinsi Jawa Timur Tahun 2008.** Surabaya: Pokja Gender bidang Pendidikan Propinsi Jawa Timur.